

BAB III

PEMBERITAAN SUARA MERDEKA TERHADAP KORUPSI

3.1. Profil Suara Merdeka

3.1.1 Sejarah Berdirinya Suara Merdeka

Suara Merdeka sebagai salah satu koran tertua di Indonesia yang lahir pada era pasca kemerdekaan. Berbagai pengalaman di bidang jurnalistik menempa H. Hetami menjadi seorang wartawan yang ulet. Menjadi pengasuh di majalah *Reethe Hoge School* (Fakultas Hukum Zaman Belanda) di Jakarta, Harian Sinar Baru zaman perjuangan di Solo menumbuhkan niatnya untuk mendirikan surat kabar sendiri, dialah H. Hetami (Bambang sadono, 1996: 33). Ketika terbit pertama tanggal 11 Februari 1950, kantor harian *Suara Merdeka* masih menumpang pada harian berbahasa Belanda, *De Locomotief*, yang juga mencetaknya. Beberapa tahun kemudian, Harian ini bisa menempati gedungnya sendiri lengkap dengan percetakannya di Jl. Merak II A. Harian ini didirikan oleh H. Hetami yang dibantu oleh H.R. Wahyoedi dan Moh. Sulaiman menerbitkan koran yang bernama "*Suara Merdeka*". Rencana awalnya, koran tersebut akan diberi nama "Mimbar Merdeka" terdapat 13 huruf padahal pendiri koran ini, H. Hetami (almarhum) tampaknya tidak suka angka ganjil, bukan percaya angka ganjil membawasial, namun kemudian dicari angka yang cocok, asalkan tidak meninggalkan kata-kata merdeka. Maka dipilihlah *Suara Merdeka* yang jumlahnya 12 huruf yang ternyata memberi berkah hingga berkembang sampai sekarang (Massoesiswo, dkk, 2003: 22). Misi awal *Suara Merdeka* adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru memperoleh kemerdekaannya. H. Hetami berpendapat bahwa aspirasi dan hati nurani rakyat perlu ditampung oleh media yang dikelola oleh pejuang-pejuang pers. Pada mulanya koran tersebut terbit sore hari, empat halaman dan dicetak hanya dibantu dua karyawan, dua meja dan dua mesin ketik. Untuk mencetaknya, *Suara Merdeka* menumpang di harian "*De*

Locomotief” Jalan Kepodang Semarang, tetapi yang paling menggembirakan adalah ketika *Suara Merdeka* mendapat kehormatan dan kepercayaan sebagai satu-satunya koran di Jawa Tengah yang diambil langganan secara kolektif oleh kesejahteraan Teer IV (Kodam IV/Diponegoro sekarang) sebanyak 1000 eksemplar tiap hari untuk dibagikan kepada kesahian -kesahiannya (Massoesiswo, dkk., 2003: 23).

Perkembangan suara merdeka saat itu belum maksimal itu terhambat dikarenakan adanya “Gunting Syarifuddin” yang memperkecil nilai mata uang menjadi separuh, selain itu pada tahun 1961 ada pemogokan dipercetakan De Locomotief, maka harian *Suara Merdeka* harus dicetak di Yogyakarta selama satu tahun lebih. Meski demikian, berkat usaha kerja keras pengasuhnya, yang sangat kreatif, dengan memunculkan rubrik-rubrik yang khas seperti Semarangan, Sirpong sebagai pojok, kemudian di Grundel dan jangan disepelkan Kliblokosuto, sebagai rubrik satu halaman bisa mengatasi cobaan demi cobaan bahkan makin lama makin mendapatkan kepercayaan karena sudah berakar di kalangan pembaca (Massoesiswo, dkk., 2003: 23).

Menurut almarhaum Hetami, wartawan sejati harus mempunyai sikap independen, obyektif, dan tanpa prasangka. Ketiga sikap ini tak lain adalah motto *Suara Merdeka*. Independen, artinya kita ingin menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok. Obyektif, dimaksud bahwa dalam mengemukakan pendapat itu kepentingan sendiri tidak boleh ditonjolkan. Sedang tanpa prasangka artinya dalam mengemukakan isi tulisan tidak dipengaruhi oleh buruk sangka ataupun sebalik (Bambang Sadono, 1996: 33).

Hal itu yang menjadikan *Suara Merdeka* merdeka terjepit. Hingga suatu ketika harus menyelamatkan diri dengan mengubah nama menjadi harian Berita Yudha edisi Jawa Tengah. Untung saja keadaan yang sangat sumpek bagi kehidupan pers nasional itu berakhir dengan hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru memberi peluang kepada pers nasional untuk kembali kepada jati diri masing-masing. Dan dengan izin

Jendral Ibnu Subroto, yang ketika itu memimpin Berita Yudha, nama *Suara Merdeka* dipulihkan kembali. Regenerasi kepemimpinan *Suara Merdeka* berlangsung ketika H. Hetami sejak 11 Februari 1982 menyerahkan pengelolaan koran pada menantunya, Ir. H. Budi Santoso. Dan tanggal 8 Februari 1986, ketika para tokoh wartawan se-Indonesia berkumpul di Yogyakarta untuk merayakan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari, H. Hetami wafat (Bambang Sadono, 1996: 33).

3.1.2. Pemberitaan Suara Merdeka Tentang Korupsi

Pemberitaan korupsi di harian Suara Merdeka selama bulan Januari 2012 dari sampel yang diambil adalah 18 koran yang terbit selama bulan Januari dengan uraian tanggal terbit dan isi pemberitaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 3 Januari 2012 terdapat 1 berita korupsi. “Nunun Diancam”

Nunun diancam minta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Nunun tidak menjelaskan siapa yang mengancamnya dan kapan ancaman tersebut diterima, pengacaranya (Mulyaharja) juga membenarkan hal tersebut. Dalam tanggal ini juga dijelaskan awal mula terjadinya kasus suap ini yang rumit dan berbelit-belit. Suap ini diberikan kepada Anggota DPR Komisi IX Periode 1999-2004 berupa cek perjalanan/pelawat sebesar 24 Milyar, sebagai imbalan agar Miranda S.Goeltom dipilih menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) pada 8 Juni 2004.

2. Tanggal 4 Januari 2012 terdapat 3 berita korupsi diantaranya:

a. “Jawaban Nunun Terbuka dan Detail”

Yang isinya salam pemeriksaan oleh KPK, Nunun mampu menjawab pertanyaan dengan detail berbagai pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Dan masih mengenai ancaman yang diterima

oleh Nunun, secara terpisah kuasa hukumnya membantah pemberitaan mengenai keberadaan ancaman terhadap kliennya. Dia sekaligus menampik laporan yang menyebutkan Nunun diancam oleh pihak-pihak yang memiliki keuangan kuat.

b. “Rosa dan El Idris Jadi Saksi Nazaruddin”

Yang isinya: Sidang dengan terdakwa M.Nazaruddin yang menerima suap berupa cek 4,6 Milyar terkait pemenangan PT. DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet pada September lalu. Rosa dan El Idris dihadirkan untuk menjadi saksi, mereka telah terlebih dulu menjadi terpidana 2,5 tahun dan 2 tahun.

c. “Kubu Imas Tuding Jaksa Emosional”

Kasus suap hakim Pengadilan hubungan industrial. Kubu Imas. Jaksa emosional .

Bandung. Imas diansari yang terjerat kasus dugaan suap PT. Onaba senilai 352 juta secara bertahap pada 1 april 2011. Untuk melancarkan imas menerima 10 juta bagi penentuan hakim, konsultasi 600 ribu, hotel 4,3 juta. Dulu dituntut 13 tahun karena terbukti melanggar pasal 12 c tentang sogokan, dan pasal 5 ayat 1 huruf a UU tipikor.

Dalam pembelaan tuntutan imas masih berat dibandingkan dengan Odih Djuanda manajer PT. Onamba yang hanya dituntut 4,5 tahun. Antoni Halim.

Pengacara imas menghargai langkah KPK yang mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dari surat tuntutan 13 tahun penjara dan 300 juta. Sikap ini emosional dan berlebih-lebihan dalam mensikapi pencabutan BAP dibandingkan dengan tuntutan Odih Djuanda papar antoni. Berdasarkan fakta kuasa hukum imas menilai tidak adanya bukti

yang kuat yang melukiskan terjadinya penerimaan uang kepada imas. Karena itu mereka meminta terdakwa harus dilepas dari tuntutan.

3. Tanggal 9 Januari 2012 terdapat 3 berita korupsi diantaranya:

a. “Usut Bos Besar KPK Tunggu Rosa”

Sebenarnya istilah ketua besar dan bos besar pertama terungkap dari percakapan antara Rosa dan anggota badan anggaran DPR dari fraksi partai Demokrat Angelina Sondakh melalui BBM. Nazarudin menuding kepada ketua badan anggaran DPR Melchias Markus Mekeng sebagai ketua besar, namun Nazar tidak mengungkap siapa ketua besar dan bos besar dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. “KPK Cari Tahu Keterlibatan Adang”

Yakni dalam kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) Nunun diperiksa oleh wakil ketua KPK Bambang Widjojanto ternyata ada kaitannya dengan Adang. Adang disebut-sebut pernah meminta Fraksi TNI/POLRI di DPR untuk memilih Miranda S.Goeltom dalam pemilihan DGSBI. Pengacara Nunun (Mulyaharja) membantah pak Adang terlibat dalam kasus ini.

c. “BK DPR Akan Berhentikan Djufri”

BK DPR akan segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap M. Djufri. Wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrat itu sudah dijatuhi vonis empat tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Padang. Anggota Komisi II DPR ini terbukti melakukan korupsi berupa lahan tanah sejumlah proyek di Kota Bukittinggi. Kasus ini terjadi pada 2007 saat Djufri menjabat sebagai wakil Wali Kota Bukittinggi. Dalam kasus ini, majelis hakim dalam persidangan terpisah juga menjatuhi hukuman empat tahun penjara kepada mantan Sekda Kota Bukittinggi, Khairul. Majelis hakim menjatuhi hukuman Djufri empat tahun penjara dengan denda 200 juta subsidi enam bulan kurungan.

4. Tanggal 10 Januari 2012 terdapat 6 berita korupsi diantaranya:**a. “Enggan Ungkap Ketua Besar”**

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Angelina Sondakh enggan mengomentari istilah bos besar dan ketua besar yang dilontarkan Nazarudin. Dia mengatakan bahwa sebaiknya menunggu dan mengikuti proses persidangan.

b. “Polri Izinkan KPK Usut Rekening Gendut”

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Saud Usman Nasution mempersilahkan penyidik KPK menyelidiki rekening gendut atau rekening mencurigakan milik anggota Polri yang tidak sesuai dengan profilnya. Mabes Polri telah memeriksa 23 rekening mencurigakan milik anggota Polri dan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat pelaporan dan Analisis transaksi keuangan (PPATK). Dari hasil pemeriksaan tersebut, 17 rekening tidak terkait tindak pidana, satu rekening pemiliknya telah meninggal dunia, satu rekening masih dalam tahap pemeriksaan, dan sisanya telah diproses pidana.

c. “KPK Kantongi Tersangka Baru”

KPK memiliki bukti baru untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus suap pemilihan DGSBI, hal itu disampaikan ketua komisi KPK Abraham Samad (9/1) namun belum dijeskan lebih lanjut tersangka baru tersebut.

d. “Nunun Miranda Amat Dekat”

Miranda membantah dirinya kenal baik dengan Nunun. Tapi pernyataan Miranda dimentahkan oleh mantan Direktur Keuangan PT. Wahana Esa Sejati, Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo. Sebenarnya mereka berdua sangat dekat, ketika dulu saya dikenalkan dengan bu Miranda, bu Nunun membawa cucunya ke kantor BI dan terlihat akrab. Arie membenarkan dirinya untuk menyerahkan cek

perjalanan kepada anggota komisi IX DPR 1999-2004 dia juga mengantarkan cek tersebut dan diserahkan pada Hamka Yandhu, Dudhi Makmun Murod, Endhin Soefihara, Udju Djuhaeri. Tapi Arie ragu soalnya uang sebanyak 24 Milyar darimana padahal saat itu PT.Wahana Esa Sejati berutang untuk membangun pabrik kelapa sawit di Riau.

e. “Melinda Belikan Anak Sedan Rp. 4 M”

Tersangka Pembobol dana nasabah Citibank, Melinda Dee, pernah membelikan mobil mewah merek Porsche untuk anaknya Muhammad Ananda (23). Harga mobil bernopol B-125-NDA tersebut 4,3 Milyar. Direktur Keuangan PT. Daindo Financial International (DFI), Sudin Riau saat menjadi saksi untuk terdakwa mengatakan, Melinda pernah mengajukan kredit untuk pembelian mobil mewah tersebut.

f. “Wakil Ketua Banggar Jadi Saksi”

Wakil ketua Badan Anggaran DPR, Olly Don dokambey (9/1) diperiksa di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan suap dana percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) dengan terdakwa Dadong Irbalewan, mantan kabag Perencanaan dan evaluasi Ditjen P2KT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Tanggal 12 Januari 2012 terdapat 5 berita korupsi diantaranya:

a. “Miliki Apartemen di Bali”

Kekayaan Melinda dee alias Melinda alias Inong terdakwa kasusdugaan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, kembali terungkap. Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, (11/1) diketahui Melinda memiliki satu unit apartemen di Legian, Bali. Dalam sidang-sidang terdahulu, terungkap sejumlah kekayaan perempuan yang diduga telah membobol dana nasabah citigold Rp.47 Milyar dalam 117

transaksi itu. Melinda diantaranya membelikan Andhika (suaminya) sebuah Hummer H3 seharga 1 milyar dan setiap bulan sang suami ditransfer uang 5-6 juta. Dia juga membelikan anaknya sebuah sedan Porsche dengan cara mencicil seharga 4,3 milyar. Melinda menyewa pula sebuah unit Apartemen Oakwood di kawasan bisnis Mega Kuningan. Harga sewa setiap bulan 36 juta. Melinda dijerat dengan dakwaan komulatif yakni dakwaan primer dan dakwaan subsider. Dan dengan seabrek dakwaan itu Melinda terancam hukuman 15 tahun penjara.

b. MA, “Inisial Ketua Besar”

Nazaruddin menuduh orang yang berada di Badan Anggaran DPR berinisial “MA” sebagai “Ketua Besar” Hotman Paris Hutapea, Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang menuduh “AU” sebagai “Bos Besar”

c. “Renovasi Ruang Rapat Banggar Rp. 20 Milyar”

Marzuki Ancam pecat Sekjen DPR

Renovasi sebuah ruangan menjadi ruang rapat baru Badan Anggaran DPR di Gedung Nusantara II menghabiskan dana 20 milyar. Interior ruang tersebut menggunakan fasilitas akustik dan ornament dari kayu. Monitor televisi berukuran tiga meter kali dua meter terpasang beserta dua monitor lain berukuran dua meter kali dua meter. Ruang itu juga dilengkapi dengan ruang pimpinan dan ruang tamu VIP. Sebelumnya public juga dibuat geram oleh rencana perbaikan toilet yang menyerap anggaran 2 milyar. Ketua DPR Marzuki Alie marah besar terhadap Sekjen DPR, Nining Indra Shaleh atas proyek renovasi tersebut. Kemarahan Marzuki dipicu penjelasan Nining mengenai spesifikasi ruang rapat baru.

d. “Agusrin Dihukum Empat tahun”

MA mengabulkan Kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M.Najamudin. Majelis Hakim Agung yang terdiri atas Artidjo Alkotsar, Krisna Harahap dan Abdul Latif, memutuskan Agusrin - Gubernur non-aktif Bengkulu periode 2005-2010- dihukum empat tahun penjara dan denda 200 juta subsidi tiga bulan kurungan.

e. “Mantan Menkes Kembali Diperiksa”

Kasus Korupsi Alat flu burung.

KPK kembali memanggil mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menjadi saksi atas tersangka Mulya A.Hasyim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan wabah flu burung di Departemen Kesehatan tahun 2006. Siti mengakui ditanya soal kasus proyek flu burung di Depkes tahun 2006. Namun dia enggan menjelaskan materi pemeriksaan. Siti pun enggan menjelaskan soal dugaan penunjukan langsung yang terjadi dalam pengadaan proyek tersebut.

6. Tanggal 13 Januari 2012 terdapat 6 berita korupsi diantaranya:

a. “Diancam Dibunuh, Rosa Tak Gentar”

Meurut pengacara Rosa M. Iskandar pengancam Rosa adalah Nazaruddin dan kerabatnya berinisial NSR dan HSY. Meski diancam Rosa tidak akan mengubah kesaksian, ia tetap akan mempertahankan BAP terkait kesaksianya dalam pengungkapan Ketua Besar dan Bos Besar. Rosa diintimidasi dan diminta utuk berbohong meyangkut kepemilikan PT. Anugerah Indah yang dimiliki Nazaruddin, kalau tidak dituruti pengancam akan membunuh Rosa dan keluarganya. Akibat ancaman itu, Rabu tengah malam Rosa terpaksa menginap di kantor

KPK . Kamis Iskandar datang ke kantor LPSK untuk meminta perlindungan bagi kliennya. Menurut Elza Syarif pengacara Nazaruddin, tudingan terhadap Nazaruddin mengada-ada. Mungkin pengacara Rosa adalah kubu “Ketua Besar”. Sedangkan menurut Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK) Pengakuan Rosa tak serta merta dipercaya Rosa harus diperiksa dulu untuk mengetahui kebenaran pengakuan itu.

b. “Proyek Ruang Banggar DPR, KPK Didesak Menyelidik”

KPK didesak turun tangan dan menyelidiki proyek ruang baru Badan Anggaran DPR senilai 20 milyar. KPK diminta memeriksa Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Marzuki Alie meminta BPK mengaudit. Kalau diluar standar gedung Negara, dan ada bukti mark up segera serahkan ke KPK.

c. “Salinan Percakapan Sri Mulyani Diserahkan

Kasus Bail Out Bank Century”

Tim Sembilan inisiator hak angket Bank Century, kemarin menyerahkan dokumen risalah telekonferensi antara mantan Menteri keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono ke KPK. Dokumen tersebut diserahkan bersama satu kotak berkas lain yang masih terait bail out Bank Century senilai 6,7 Triliun. Anggota tim Sembilan, Fahri Hamzah mengatakan, dokumen risalah telekonferensi itu berisi informasi penting terkait penyelamatan Bank Century yang kemudian ternyata bermasalah.

d. “Amrun Daulay Divonis 17 Bulan”

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis anggota komisi II DPR dari partai Demokrat, Amrun Daulay dengan hukuman 17 tahun penjara dan denda 50 juta subsidi tiga bulan kurungan. Amrun terbukti menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain dalam proyek pengadaan mesin jahit dan sapi impor dari Australia. Dari kasus tersebut negara dirugikan sebesar 15 milyar lebih.

e. “Emir Tak Kenal Nunun”

Politikus PDIP Izedrik Emir Moeis menegaskan dirinya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu. Dia mengembalikan cek perjalanan dari Dudhie Makmun Murod karena menduga cek itu terkait pemilihan DGSBI. Terdakwaskas ini awal tahun lalu termasuk Agus Condro Prayitno mengungkapkan bahwa Emir sempat diberi cek perjalanan namun mengembalikannya lagi kerekannya Panda Nababan. Dalam kasus ini Nunun disangka membagikan 480 cek perjalanan senilai 24 Milyar per cek @ Rp. 50.000.000 kepada Komisi IX untuk memilih Miranda S. Goeltom.

f. “Majelis Hakim Perkara Agus Sukma Dilaporkan”

KP2KKN Surati MA dan KY

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng melaporkan hakim perkara Agus Sukmaniharto, broker tanah di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Diketahui, terdakwa korupsi tersebut dinyatakan lepas dari dakwaan korupsi oleh majelis hakim Tipikor Semarang yang diketuai Lilik Nuraini dengan anggota Lazuardi Lumban Tobing dan Shininta Sibarani. KP2KKN mencium kejanggalan dalam putusan majelis hakim tersebut. Putusan Agus Sukma berbeda jauh dengan putusan Hamid. Padahal terdakwa Hamid sama-sama broker tanah di tempat yang sama. Berdasarkan data kejanggalan yang dihimpun, KP2KKN lantas melayangkan laporan pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Laporan tersebut dituangkan dalam surat resmi yang dikirim melalui pos dan email.

7. Tanggal 14 Januari 2012 terdapat 3 berita korupsi diantaranya:

a. “Renovasi Terindikasi Korupsi”

Pimpinan DPR memberi peringatan keras secara tertulis kepada Sekjen DPR Nining Indra Saleh, terkait besarnya anggaran renovasi ruangan Banggar yang mencapai 20 milyar.

Biaya Renovasi Ruang Rapat Badan Anggaran DPR

- Tender untuk konsultan perencana terbit 12 September 2011 dengan pemenang tender PT Gubah Laras, nilai kontrak Rp.565.500.000
- Tender untuk konsultan pengawasan terbit 7 November 2011 dengan pemenang tender PT Jagat Rona Semesta, nilai kontrak Rp.234.390.000
- Tender untuk pelaksanaan pekerjaan terbit 14 November-31 Desember 2011 adalah 48 hari kalender. Pemenang tender PT PP Tbk, nilai kontrak Rp.19.995.000.000

Perlengkapan yang ada didalamnya:

- Kursi ruang pimpinan Banggar ditaksir seharga 12 juta sedang untuk anggota Banggar sekitar 5 jutaan
- Untuk lampu menelan anggaran 250 juta
- 3 TV wall 3x2 meter disusun dari 12 unit TV LCD tanpa bingkai. Per unit 5 juta jumlah total 180 juta.
- Ruang Banggar seluas 400 m dilengkapi karpet impor merek Miliken. Harganya ditaksir 5 juta per meter.

b. “LPSK sembunyikan Rosa”

Juru bicara LPSK Maharani Siti Shopia jum’at (13/1) tidak mau menjelaskan secara detail waktu pemindahan Rosa dan kema yang bersangkutan dipindahkan. Ada 3 lembaga yang mengamankan Rosa yakni KPK, Kementerian Hukum dan Ham dan LPSK

c. “KPK Selidiki Kasus Baru”

Pengembangan Suap Wisma Atlet

KPK memulai penyelidikan kasus baru terkait perkara suap Wisma Atlet Sea Games, untuk keperluan itu, kemarin Penyidik KPK memeriksa terpidana Mohammad El- Idris seorang mantan Manajer Pemasaran PT.Duta Graha Indah (DGI) yang telah divonis 2tahun penjara. Idris datang ke kantor KPK sekitar pukul 10.00 untuk diperiksa terkait pengadaan barang dalam proyek tersebut. Kasus Wisma Atlet Sea Games menjerat empat orang selain El-Idris tiga lainnya yakni mantan Direktur Pemasaran PT.Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang (2,6 tahun), Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) non aktif Wafid Muharam (3tahun) dan bekas bendahara umum Partai Demokrat Muh. Nazaruddin yang kini masih menjalani persidangan. Disebutkan oleh jaksa dari hasil negosiasi antara Idris, Dirut PT.DGI Dudung Purwadi, Mindo Rosalina Manulang, serta Nazaruddin disepakati pembagian uang dari total nilai proyek Rp.191,6 Milyar. Nazaruddin 13 persen, Gubernur Sumsel 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet 2,5 persen, Panitia Pengadaan 0,5 persen, Sesmenpora Wafid Muharram 2 persen. Alex Noerdin membantah dirinya kecipratan uang panas tersebut.

8. Tanggal 15 Januari 2012 terdapat 1 berita yakni “Skenario Bungkam Rosa”

Pihak M. Nazaruddin menilai ada skenario besar dari “Ketua Besar” dan “Bos Besar” untuk membungkam Mindo Rosalina Manulang terkait dengan kesaksiannya dalam perkara Wisma Atlet.

9. Tanggal 16 Januari 2012 terdapat 2 berita korupsi diantaranya:

a. “Siap Buka-bukaan”

Rossa Janji Ungkap Misteri BBM

Mantan Direktur Pemasaran PT. Anak negeri Mindo Rosalina Manulang hari ini akan kembali menjalani persidangan kasus suap Wisma Atlet Sea Games dengan terdakwa bekas bosnya M.

Nazaruddin. LPSK telah menyetujui permintaan agar Rosa member kesaksian lewat Teleconference demi keamanan yang bersangkutan. Namun Elza (Pengacara Nazaruddin) LPSK tak terjebak keinginan pihak tertentu yang berusaha agar Rosa tak dihadirkan langsung dalam sidang. Menurutnya kehadiran Rosa di pengadilan tipikor justru akan membuat semuanya terang benderang.

b. “Renovasi Banggar Diputuskan Tim Kecil”

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Heryanto mengungkapkan renovasi ruang rapat Badan Anggaran diputuskan oleh tim kecil BURT bersama Sekjen DPR serta konsultan yang menguasai hal teknis rencana renovasi.

10. Tanggal 18 Januari 2012 terdapat 4 berita korupsi diantaranya:

a. “Adang Jadi Saksi Untuk Nunun”

Adang diperiksa sebagai saksi untuk istrinya yang juga tersangka dalam kasus itu. Adang membantah memerintah fraksi TNI/POLRI untuk memilih Miranda sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Kemarin KPK juga memeriksa Direktur Kepatuhan Bank Arta Graha Witadinata Sumantri sebagai saksi untuk Nunun. Sebelumnya KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Artha Graha antara lain Kepala kantor Cabang Pemuda Arifin Djaja dan pegawai bagian transfer dana bernama Soedin.

b. “KPK Percaya Rosa”

Kesaksian di sidang jadi alat bukti

KPK percaya pada keterangan Mindo Rosalina Manullang yang menyebut keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang. Keterangan Rosa menjadi alat bukti untuk menjerat tersangka baru. Ketika bersaksi untuk terdakwa Nazaruddin, Rosa menyebut sejumlah tokoh yang menerima

jatah dari anggaran proyek pembangunan Wisma Atlet yang menelan dana 191 Milyar. Mereka antara lain anggota Banggar DPR Angelina Sondakh yang menerima 5 Milyar, tim sukses Andi Mallarangeng ketika berlangsung Kongres Partai Demokrat di Bandung (500 jt) dan politikus PDIP I Wayan Koster (Menerima bagian dari dana yang diserahkan lewat Angelina Sondakh) Rosa mengungkapkan bahwa “Ketua Besar” adalah wakil ketua Banggar “Mirwan Amir” Menurut Nazaruddin ketua besar adalah Anas Urbaningrum sedangkan Mirwan Amir adalah Bos Besar.

c. “Proyek Ruang Banggar DPR”

Empat Orang Langgar Kode Etik

Badan Kehormatan DPR mengantongi empat nama yang diduga melanggar kode etik dalam proyek renovasi ruang rapat Banggar yang menelan dana 20 Milyar. Nama-nama itu diperoleh berdasarkan keterangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, terutama mengenai pengusul renovasi. Namun ketua BK DPR M.Prakosa belum bersedia menyebutkan identitas keempat orang itu.

d. “Polisi Dalami Dugaan Kasus Mesuji”

Mabes Polri akan mendalami unsur korupsi dalam kasus pengamanan kawasan hutan yang disengketan oleh warga kabupaten Mesuji, Lampung. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin oleh wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Denny Indrayana menemukan dokumen aliran dana ke oknum polisi dalam perkara sengketa lahan kelapa sawit tersebut.

11. Tanggal 19 Januari 2012 terdapat 5 berita korupsi diantaranya:

a. “Renovasi Pesanan Banggar”

Sekjen DPR Simpan Rekaman.

Usulan spesifikasi perabotan dalam proyek renovasi ruangan rapat antara Sekjen, BURT, dan Banggar DPR. Menurut wakil Ketua DPR Pramono Agung Wibowo kemarin, Sekjen DPR menyimpan bukti rekaman berisi pernyataan pimpinan Badan Anggaran saat memilih spesifikasi barang yang akan digunakan diruang rapat baru.

b. “Nazaruddin Telepon Neneng dari Rutan”

Tuding Anas Terima Fee Rp.80 Milyar

Mantan bendahara umum Partai Demokrat ini mengaku pernah menghubungi istrinya melalui hubungan telepon seluler dari dalam rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa dua, Depok. Selain itu Nazaruddin menjelaskan peran Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus PLTS yang juga menjerat istri Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka. Dia menuding Anas Urbaningrum telah menerima fee sebesar Rp 80 miliar dari proyek PLTS yang menelan biaya hingga Rp. 2,2 trilin.

c. “Jaksa Perkara Agus Sukma Kasasi”

Korupsi Jatirunggo

Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejari Ambarawa mengajukan kasasi atas putusan bebas bagi terdakwa Agus Sukmaniharto pada 9 januari lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang melepaskan Agus Sukma dari jerat hokum lantaran dakwaan jaksa tak terbukti di persidangan.

d. “Sakit Melinda Kambuh”

Terdakwa pembobolan dana nasabah Citibank, Melinda dee tidak bisa datang dalam persidangan dengan alasan sakit. Jaksa Penuntut umum Arya Wicaksana menerima surat keterangan dokter Rutan Pondok Bambu menjelaskan bahwa Melinda butuh istirahat karena menderita darah tinggi (hipertensi) berat. Namun surat itutidak

mencantumkan lama perawatan yang dibutuhkan. Melinda pernah dibantarkan di Rumah Sakit Polri karena mengalami radang payudara. Dia didakwa membobol rekening nasabah Citibank dalam 117 transaksi senilai Rp.47 milyar. Uang itu dialirkan ke rekening suaminya, Andhika Gumilang, serta kerabatnya, Visca Lovitasari dan Ismail bin Janim.

e. “Idris Cabut BAP Terkait Fee untuk Nazaruddin”

Manajer Pemasaran PT. Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada penyidikan di KPK. Keterangan yang dimaksud terkait pembicaraannya dengan Nazaruddin mengenai *fee* proyek wisma atlet Sea Games.

12. Tanggal 20 Januari 2012 terdapat 3 berita korupsi diantaranya:

a. “KPK Turun Tangan”

Telusuri Renovasi Ruang Rapat Banggar

Mekeng Ancam Tuntut Sekjen DPR

KPK membutuhkan hasil audit BPK untuk menentukan ada tidaknya penggelembungan anggaran dalam proyek renovasi ruang Banggar DPR. Secara terpisah Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng seusai dimintai keterangan oleh BK Mengancam akan menuntut Sekjen DPR Nining Indra Saleh terkait keberadaan rekaman pembicaraan rapat. Rekaman itu diduga membuktikan jika Banggar adalah pihak yang mengusulkan seluruh spesifikasi ruang rapat baru. Mekeng menyebut rapat Banggar bersifat konsultasi sehingga rekaman tak diperbolehkan. Dia menilai Sekjen mempunyai iktikad tidakbaik terhadap Banggar jika memang menyembunyikan rekaman tersebut dan ngotot tak merasa bersalah. Dia tetap melempar kesalahan pada Sekjen DPR.

b. “Bukti Belum Diterima”

KPK belum menerima bukti terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Kaltim dan Riau yang diduga melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Rabu lalu, terdakwa kasus suap Wisma Atlet SeaGames, M.Nazaruddin menuding proyek tersebut juga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah menjadi saksi bagi terdakwa Timas Ginting, Nazaruddin menuduh Anas menerima uang 80 milyar dari proyek pembangkit listrik di Kaltim dan Riau. Proyek tersebut bernilai total 2,2 triliun.

c. “Keluarga Melinda Divonis”

Terlibat Pencucian Uang

Suami siri, adik, dan adik ipar Melinda dee yakni Andhika Gumilang, Visca Lovitasari, dan Ismail bin Janim divonis bersalah karena terlibat praktik pencucian uang. Andhika divonis 4 tahun penjara dan denda 350 juta subsidi lima bulan kurungan. Visca dijatuhi hukuman pidana 2 tahun sepuluh bulan penjara dan denda 200 juta subsidi dua bulan kurungan. Adapun Ismail dijatuhi hukuman tiga tahun delapan bulan penjara serta denda 200 juta subsidi dua bulan kurungan.

13. Tanggal 21 Januari 2012 terdapat 4 berita korupsi diantaranya:

a. “BK: Anggaran Renovasi Tak Wajar”

Setelah meminta keterangan dari sejumlah pihak, BK DPR menyimpulkan, anggaran renovasi ruang rapat Banggar DPR senilai 20 miliar memang jauh dari kewajaran. BK menilai bahwa sebenarnya tidak ada masalah dalam usulan Banggar kepada Sekjen DPR soal kebutuhan ruang rapat yang lebih representatif. Yang menjadi masalah, menurut Prakosa, adalah biaya renovasi yang sangat tinggi dan diluar kepatutan.

b. “Rosa Akan Dipertemukan Anak”

Rosa merupakan saksi kunci dari kasus dugaan wisma atlet yang tahu siapa ketua besar dan bos besar. Dia diancam terus sampai psikologisnya terganggu dan minta pada LPSK untuk dipertemukan dengan anaknya.

c. “Sakit, Wa Ode Batal Diperiksa”

KPK batal memeriksa anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati karena sakit. Politikus PAN itu seharusnya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID). Menurut kepala Biro Humas KPK, Johan Budi menjelaskan pemberitahuan sakit Nurhayati disampaikan melalui surat. Penyidik komisi antikorupsi pun siap menjadwalkan ulang waktu pemeriksaan. Rencananya, Wa Ode akan dipanggil lagi pekan depan.

d. “Marzuki Laporkan KPK”**Kasus Renovasi Ruang Banggar DPR**

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan siap mundur jika terlibat korupsi dalam proyek-proyek pengadaan di institusinya. Bahkan politikus senior partai Demokrat ini bersedia mundur dari keanggotaan DPR. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini memaparkan, dia melaporkan seluruh proyek bermasalah yang dilaksanakan sejak dirinya memimpin DPR pada tahun 2010. Salah satunya adalah dugaan korupsi dalam proyek renovasi ruang Banggar DPR senilai 20 milyar. Marzuki yang didampingi oleh sekjen DPR Nining Indra Saleh, langsung menyampaikan pengaduan ke pimpinan KPK. Namun Marzuki tidak menyebutkan pihak-pihak yang diduga “bermain” dalam proyek-proyek bernilai fantastis itu.

14. Tanggal 24 Januari 2012 terdapat 1 berita yakni “Bachtiar Chamsyah Hirup Udara Bebas”

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menghirup nafas lega. Terpidana kasus pengadaan sarung, mesin jahit, impor sapi di Depsos pada 2004-2008 ini bebas sejak sabtu lalu dari LP Cipinang, Jakarta. Menurut Djufri, kliennya bebas karena sudah meyelesaikan masa hukuman selama 20 bulan.

15. Tanggal 25 Januari 2012 terdapat 3 berita korupsi diantaranya:

a. “Fraksi PAN Dilarang ke Ruang Banggar”

BK Sudutkan Kabiro

Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, Ir Taufik Kurniawan MM melarang sejumlah anggota Fraksi PAN (FPAN) DPR menginjakkan kakinya ke ruang Banggar sebelum masalah itu clear. Larangan itu bukan harga mati, jika hasil audit BPK renovasi ruang Banggar senilai 20 miliar yang dinilai sejumlah kalangan tidak masuk akal itu, terbukti clear maka larangan itu dicabut. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Senayan. Badan Kehormatan(BK) DPR menilai, pihak yang harus bertanggung jawab dalam proyek renovasi ruang Banggar senilai 20 miliar adalah pejabat pembuat komitmen, yakni Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi (Harbangin) Sekjen DPR, Soemirat. Menurut Ketua BK, M Prakosa, penilaian ini sementara diambil setelah pihaknya mendalami kasus tersebut dengan memeriksa konsultan, pengawas, dan pelaksana proyek. Jadi yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen yakni Kepala Biro.

b. “Nunun Limbung Lagi”

Dia tiba-tiba lunglai saat menuruni tangga pintu keluar gedung KPK. Pengacaranya Ina Rachman mengatakan, kliennya tidak sempat menjalani pemeriksaan karena kesehatannya menurun.

c. “Yulianis Bersaksi”

Mantan wakil direktur keuangan PT. Permai Group, Yulianis akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap wisma Atlet SeaGames dengan terdakwa Nazaruddin, Nazaruddin didakwa menerima suap berupa cek senilai Rp. 4,6 Milyar dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El- Idris. Cek itu diduga sebagai imbalan karena Nazaruddin membantu PT.DGI memenangi proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games senilai 191,6 Milyar..

16. Tanggal 26 Januari 2012 terdapat 5 berita korupsi diantaranya:

a. “Jatah DPR Rp. 10 Milyar”

Komisi Angie dan Koster 5 Milyar

Kesaksian Yulianis dalam persidangan kasus wisma atlet Sea Games dengan terdakwa M.Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta (25/1), menyajikan beberapa informasi baru. Pengakuan Yulianis antara lain:

- 1) Grup Permai pernah member komisi untuk Angie dan Iwayan Koster Rp.5 milyar, dibayar berangsur
- 2) Gaji Anas Urbaningrum di Grup Permai Rp. 20 juta, tapi uangnya selalu dikembalikan
- 3) Datang ke Konggres Demokrat 2010 di Bandung membawa Rp.30 milyar dan 5 juta dolar AS
- 4) Jatah Andi Mallarangeng sebagai kandidat ketua umum Rp. 150 Juta
- 5) Jatah Anas Rp. 100 juta di konggres tak diberikan sesuai instruksi M.Nazaruddin.
- 6) Nazaruddin meminta dibuatkan paspor dan KTP palsu
- 7) Jutaan dolar uang Nazaruddin di Singapura belum disita oleh KPK.

b. “Tersangka Kasus Wa Ode Bertambah”

KPK kembali menetapkan tersangka dalam kasus yang menjerat anggota Banggar DPR dari PAN Wa Ode Nurhayati. Kali ini KPK menetapkan tersangka daripihak yang diduga menyuap Wa Ode, yakni pengusaha Fahd Arafiq. Fahd dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU tindak pidana korupsi. Pengusaha yang juga menjadi ketua Gema MKGR ini diduga memberikan uang terkait pengucuran anggaran di tiga daerah di Provinsi Aceh.

c. “Mantan Menkes Diperiksa KPK”

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhillah Supari kembali diperiksa KPK. Siti diperiksa sebagai saksi atas tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan, Rustam Syarifudin Pakaya, salah satu Direktur di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta. Saat itu Rustam menjabat kepala pusat Penanggulangan krisis Depkes, sedangkan Siti Fadhillah sebagai Menkes. KPK menetapkan Rustam sebagai tersangka sejak 28 September 2010. Rustam selaku pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen pada proyek alkes itu diduga menyalahkan kewenangannya dan menerima uang dari rekanan. Kerugian Negara ditaksir sekitar 6,8 miliar. Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan alkes 2007 ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes penanggulangan flu burung 2006 yang melibatkan Direktur Bina Pelayanan Medik Kemenkes Ratna Dewi Umar dan Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes 2006, Mulya A Hasyim.

d. “Dharnawati Ngaku Hidup dari Belas Kasihan”

Terdakwa kasus suap pejabat Kemenakertrans, Dharnawati tidak henti-henti menangis di Pengadilan Tipikor Jaksel. Ia menangis saat menceritakan bebannya akibat kasus suap tersebut. Untuk hidup ditahananpun menunggu belas kasihan orang, pakaian-pakaian inipun

diberikan orang. Ia mengeluhkan hancurnya perusahaan miliknya, nama baik keluarganya, anaknya yang sampai berhenti sekolah ada juga anaknya yang kecelakaan hingga harus dirawat di Rumah Sakit bahkan rekening pribadi semua diblokir KPK. Selain itu tak ada lagi pekerjaan yang bisa didapatkan. Semuanya menjauh karena takut dengan KPK. Dharnawati dituntut empat tahun penjara denda 250 juta subsidi enam bulan kurungan.

e. “Berkas Tasiman dilimpahkan”

Korupsi APBD Pati

Mantan Bupati Pati Tasiman dan Wakil Bupati Pati Kotot Kusmanto akan disidang pada 31/1 dan 30/1. Berkas keduanya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Berkas Tasiman terdaftar dengan nomor perkara 10/Pidsus/2012/PN.Tipikor Smg, sedangkan Berkas Kotot terdaftar dengan nomor perkara 11/Pidsus/2012/PN.Tipikor Smg. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2001-2006 itu tersandung kasus dugaan penyimpangan dana laporan pertanggung jawaban (LPJ) bupati tahun 2002 dan pos bantuan pihak ketiga 2003 senilai 1,9 miliar.

17. Tanggal 27 Januari 2012 terdapat 4 berita korupsi diantaranya:

a. “Setelah 2.786 Hari.....”

Setelah 2.786 hari bersembunyi dibalik ketidaktahuan. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan KPK telah memegang bukti kuat keterlibatannya dalam kasus suap pemilihan DGSBI dengan Miranda sebagai pemenangnya. Dan mengumumkan status Miranda sebagai tersangka pada tanggal 26 Januari 2011

b. “Miranda Tidak Ditahan”

Tersangka Cek Pelawat

KPK Telusuri Sponsor Suap

KPK menjerat Miranda dengan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp. 250 Juta. Namun hingga kemarin Miranda belum ditahan, menurut Abraham Samad penahanan akan dilakukan ketika penyidikan hampir rampung. Agus condro Prayitno(mantan terpidana kasus suap pemilihan DGSBI) menyambut baik penetapan Miranda sebagai tersangka. Hal ini memungkinkan sebagai pintu masuk untuk mengungkapkan parapemburu rente yang mensponsori suap.

c. “Wa Ode Ditahan”

Serahkan Data Penyelewengan Banggar

Anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati ditahan KPK se usai pemeriksaan kali kedua sebagai tersangka. Politikus PAN itu dibawa menggunakan mobil tahanan milik KPK ke Rutan Pondok Bambu, Jaktim, setelah menjalani pemeriksaan sekitar Sembilan jam, penahanan Nurhayati dilakukan pukul 20.55. Dia didampingi pengacara sekaligus kakak kandungnya Wa Ode Nur Zaenab dan beberapa advokat. Matanya terlihat berkaca-kaca saat ditanya mengenai penahanannya. Pada pemeriksaan kedua itu, Nurhayati mengaku membawa segepok data mengenai penyelewengan yang terjadi tubuh Banggar dan akan diserahkan ke penyidik. Dalam kasus ini, Wa Ode diduga menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran PPID senilai 40 milyar untuk tiga kabupaten di Aceh besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah. Wa Ode disangka menerima fee 5-6 persen untuk meluluskan anggran tiga kabupaten itu.

d. “KPK Telusuri Uang Nazar di Singapura”

Setelah kessaksian Yulianis dalam persidangan (25/1) yang salah satunya mengakui bahwa bekas bosnya itu masih menyimpan uang jutaan dolar AS. Uang tersebut disimpan diperusahaan milik

Nazaruddin, KPK belum sempat menyita uang itu. Sebelum kejadian, uang-uang yang ada di Jakarta dikirim ke Singapura. Pengirim pertama 5 juta dolar AS, 3 Juta dolar Singapura, dan 2 Juta Euro.

18. Tanggal 31 Januari 2012 terdapat 5 berita korupsi diantaranya:

a. “Dipecat dari Banggar”

BK DPR memberhentikan Wa Ode Nurhayati sebagai anggota Banggar Dewan. BK memutuskan Wa Ode melanggar kode etik karena menuduh pimpinan DPR sebagai mafia anggaran tanpa bukti. Terhadap pelanggaran itu, BK telah memutuskan Wa Ode tidak boleh ke Banggar lagi. Tetapi sampai sekarang ini, ia masih jadi anggota Dewan hingga ada ketetapan hukum di KPK.

b. “Bungkam Ungkap Sponsor”

Pemeriksaan Miranda untuk Nunun

Ketika ditanya tentang apakah Bank Arta Graha yang menjadi sponsor kasus suap yang menyeret dirinya ke ranah hukum, Miranda terkesan malas untuk menjawabnya. Dan dalam pemeriksaan Miranda untuk Nunun tidak disebutkan dalam frame berita ini apa saja pertanyaan dan jawaban yang dikemukakan kpk dan Miranda.

c. “Hakim Imas Dihukum 6 Tahun Penjara”

Imas Dianasari dinyatakan terbukti bersalah atas kasus suap yang menjaturnya ketika menjabat sebagai hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Bandung. Majelis hakim pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara denda 200 juta subsidi 3 bulan kurungan.

d. “Andhika Tak Ajukan Banding”

Andhika Gumilang dan Ismail bin Janim, suami siri dan adik ipar Melinda tidak mengajukan banding atau menerima vonis majelis

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara adik Melinda, Visca Lovitasari mengajukan banding. Devie Waluyo pengacara Visca mengatakan pihaknya telah mengajukan banding atau vonis majelis hakim yakni, dua tahun 10 bulan kurungan rumah, dan denda 200 juta subsidi dua bulan kurungan. Karena dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya dimintakan tolong dan tidak tahu apa-apa.

e. “Dharnawati Divonis 2,5 tahun”

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada kuasa Direksi PT.Alam Jaya Papua, Dharnawati dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan denda 100 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dharnawati terbukti member hadiah uang senilai 1,5 miliar kepada pejabat Kemenakertrans. Perbuatannya melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Kemenakertrans dapat mengusulkan empat kabupaten yakni Mimika, Keerom, Manokwari, dan Teluk Wondama sebagai daerah penerima dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah. (PPID) untuk kawasan Transmigrasi senilai 73 miliar.

Dari Pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 18 surat kabar Suara Merdeka terdapat 64 berita korupsi klasifikasinya terdapat 16 kasus korupsi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kasus Suap Cek Pelawat Nunun Nurbaeti dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) ada 11 berita
- b) Kasus Dugaan Suap Wisma Atlet Sea Games ada 15 berita
- c) Kasus Suap Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ada 2 berita
- d) Korupsi Lahan Tanah di Kota Bukittinggi ada 1 berita
- e) Pencucian Uang oleh Melinda Dee ada 5 berita
- f) Rekening Gendut Polri ada 1 berita
- g) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) ada 7 berita

- h) Biaya Renovasi Ruang Badan Anggaran DPR yang menelan biaya 20 Milyar ada 10 berita
- i) Bail Out Bank Century ada 1 berita
- j) Korupsi Dana Bagi Hasil PBB ada 1 berita
- k) Korupsi Pengadaan alat kesehatan Flu Burung ada 2 berita
- l) Proyek Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi Impor dari Australia ada 2 berita
- m) Korupsi Dana tukar guling lahan Perhutani di Desa Jatirunggo ada 2 berita
- n) Kasus Pengamanan Kawasan Hutan yang disengketakan warga Mesuji ada 1 berita
- o) Kasus Korupsi Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans ada 2 berita
- p) Korupsi APBD Pati ada 1 berita

Rincian kasus korupsi pada bulan Januari 2012 berdasarkan kode abjad dibawah ini.

| No. | Tanggal | Jumlah Berita | Kasus Korupsi (sesuai kode abjad) |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. | 3 Januari 2012 | 1 | A |
| 2. | 4 Januari 2012 | 3 | a, b, c |
| 3. | 9 Januari 2012 | 3 | b, a, d |
| 4. | 10 Januari 2012 | 6 | b, f, a, a,e, g |
| 5. | 12 Januari 2012 | 5 | e, b, h, j,k |
| 6. | 13 Januari 2012 | 6 | b, h,i,l,a,m |
| 7. | 14 Januari 2012 | 3 | h,b,b |
| 8. | 15 Januari 2012 | 1 | B |
| 9. | 16 Januari 2012 | 2 | b, h |
| 10. | 18 Januari 2012 | 4 | a,b,h,n |
| 11. | 19 Januari 2012 | 6 | h,o,m,b,e |
| 12. | 20 Januari 2012 | 3 | h,o,e |

| | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|
| 13. | 21 Januari 2012 | 4 | h,b,g,h |
| 14. | 24 Januari 2012 | 1 | L |
| 15. | 25 Januari 2012 | 3 | h,a,b |
| 16. | 26 Januari 2012 | 5 | b,g,k,g,p |
| 17. | 27 Januari 2012 | 4 | a,a,g,b |
| 18. | 31 Januari 2012 | 5 | g,a,c,e,g |

Dari sekian kasus korupsi yang telah diberitakan Harian Suara Merdeka selama edisi Januari 2012, penulis hanya mengambil dua kasus untuk dianalisis dalam bab selanjutnya yakni kasus suap Nunun Nurbaeti dalam Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) Miranda Swaray Goeltom berita dan kasus Dugaan Korupsi Wisma Atlet Sea Games dengan wartawan yang berinisial J13-65

Kategori kasus korupsi DGSBI dan Wisma Atlet berdasarkan inisial Wartawan Suara Merdeka

| No. | Kategori | Tgl | Judul Berita | Wartawan |
|-----|--|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) | 3 | Nunun diancam minta perlindungan LPSK | J13-43 |
| | | 4 | Jawaban Nunun Terbuka Dan Detail | J13-65 |
| | | 9 | Kpk Cari Tahu Keterlibatan Adang | J13,dtc-65 |
| | | 10 | a. Kpk Kantongi Tersangka Baru | J13,J22,H28-25,59 |
| | | | b. Nunun Miranda Amat Dekat | J13-59 |
| | | 13 | Emir Tak Kenal Nunun | J13-43 |
| | | 18 | Adang Jadi Saksi Untuk Nunun | J13,dtc-25,59 |
| | | 25 | Nunun Limbung Lagi | J13-59 |
| | | 27 | a. Setelah 2.786 hari..... | 43 |
| | | | b. Miranda tidak ditahan | J13-43 |
| 31 | Bungkam ungkap sponsor | J13-65 | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|---|----------------|
| 2 | Kasus suap Wisma Atlet Sea games | 4 | Rosa dan El Idris Jadi Saksi Nazaruddin | J13-43 |
| | | 9 | Usut Bos Besar KPK Tunggu Rosa | J13,dtc-59 |
| | | 10 | Enggan Ungkap “Ketua Besar” | J22,H28-25 |
| | | 12 | MA, Inisial Ketua Besar | J13-65 |
| | | 13 | Diancam Dibunuh Rosa Tak gentar | J13,K24,dtc-59 |
| | | 14 | LPSK Sembunyikan Rosa | D3,J13,J22,H28 |
| | | | KPK Selidiki Kasus Baru | J13,dtc-59 |
| | | 15 | Skenario Bungkam Rosa | Dtc-71 |
| | | 16 | Siapa Buka-bukaan Rosa Janji Ungkap Misteri BBM | D3,J13,dtc-65 |
| | | 18 | KPK Percaya Rosa | J13-59 |
| | | 19 | Idris Cabut BAP terkait Fee untuk Nazaruddin | J13-71 |
| | | 21 | Rosa Akan Pertemukan Anak | J13-65 |
| | | 25 | Yulianis Bersaksi | J13-59 |
| | | 26 | Jatah DPR Rp. 10 M Komisi Angie & Koster 5 M | J13-65 |
| 27 | KPK Telusuri Uang Nazar di Singapura | J13,D3,DWI-65 | | |

Dari tabel diatas penulis akan mengambil dua tema yang masing-masing terdiri dari empat berita dan dua berita dengan wartawan yang sama.

Kasus korupsi korupsi DGSBI dan Wisma Atlet yang diberitakan wartawan

J1-365

| No | Kategori | Berita / tanggal | Wartawan |
|----|--|------------------|----------|
| 1. | Kasus suap Wisma Atlet Sea games | 4 | J13-65 |
| | | 12 | J13-65 |
| | | 26 | J13-65 |
| | | 21 | J13-65 |
| 2. | Kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) | 4 | J13-65 |
| | | 31 | J13-65 |

3.2. Perkembangan Suara Merdeka

Awal kemajuan *Suara Merdeka* dimulai setelah masuknya beberapa tenaga redaksi seperti Soewarno, SH, Mochtar Hidayat (alm), Tjan Thwan Soen, Soejono Said, L. Poedji Srijono, Hanapi, Modjono (alm), dan Drs. Sutrisno, pada saat itulah *Suara Merdeka* terbit pagi hari. Tahun 1956, menambah penerbitan “Minggu Ini” yang terbit setiap minggu. *Suara Merdeka* memiliki percetakan sendiri tahun 1960. ini berarti sejak tahun ini, *Suara Merdeka* tidak lagi dicetak di percetakan “De Locomotief” tetapi dipercetakan miliknya sendiri “NV. Semarang”. Dengan menggunakan mesin Duplex dan sejumlah mesin penyusun huruf Intertype dan Linotype. Pada awal tahun 1970-an *Suara Merdeka* memasuki babak baru era ofset. Dengan demikian semua perangkat huruf, lay out dan unsur pra cetak menyesuaikan. Meskipun masih menggunakan mesin ketik, namun sebagian perangkat lain sudah dapat diganti komputer dan mesin “Duplex” diganti dengan mesin Web Offset merk “Pacer” yang mampu mencetak dengan kecepatan 30.000 eksemplar/ jam dan mempunyai lagi yang terbaru merk “Goos Orbanite” dengan kecepatan mesin cetak 60.000 eksemplar / jam (Mas soesiswo, 2002: 20).

Memasuki tahun 1992, *Suara Merdeka* menggunakan teknologi layout layar dengan menggunakan macintos. Dengan teknologi ini, proses pembuatan berita, pengiriman, editing, penyusunan, dan pemilihan huruf layout serta pengaturan warna melalui komputer semua dan seluruh bagian bisa on-line (Mas soesiswo, dkk, 2002: 21).

Perubahan dan kemajuan lain yang bisa dilihat adalah dengan selalu menambah jumlah halaman setiap harinya, dan liputan langsung ke berbagai negara. Juga penambahan rubrik yang selalu menarik sesuai kebutuhan pembaca. Sebelum tanggal 1 Mei 2000 *Suara Merdeka*. Terbit 16 halaman empat kali dan selebihnya 12 halaman full colour. Kini *Suara Merdeka* terbit 20 halaman dengan menambah liputan-liputan khusus yang mengcover wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Pengembangan usaha penerbitan di *Suara Merdeka* Group meliputi

majalah “MOP dan Belia” yang bekerjasama dengan Depdikbud Jawa Tengah”, “Hello” dalam bahasa Inggris serta harian sore Wawasan. Terbitan Minggu ini yang sekarang berubah menjadi Tabloid “Cempaka” (Massoesiswo, 2003: 23).

Di luar penerbitan *Suara Merdeka* Group juga mempunyai anak perusahaan seperti PT. Dentrace yang bergerak di bidang kontraktor, radio FM setereo “Suara Sakti”. Untuk menunjang pengembangan berbagai usaha dilakukan *Suara Merdeka* Group. Pada HUT ke-32, yakni pada tahun 1982, industri pers ini menempati gedung dan percetakan barunya di Jalan Raya Kaligawe KM 5 Semarang. Gedung bertingkat megah ini digunakan untuk kantor redaksi dan percetakan PT. Mascom Graphy. Anak perusahaan *Suara Merdeka*. Sedangkan tahun 1984 dibuka dan ditempati pula gedung direksi dan bagian TU, Sirkulasi, Iklan, di Jalan Pandanaran 30 Semarang (Massoesiswo,dkk, 2003 : 24).

Suara Merdeka yang terbit di Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, berarti *Suara Merdeka* mempunyai komitmen dengan masyarakat. Daerah dan pemerintah Jawa Tengah. Lokasi pemberitaan juga sekaligus merupakan pangkal usaha pembangunan. Pembatasan wilayah peredaran ini penting artinya dalam hubungan dengan ragam berita. Nuansa penyajian waktu sampai ke tangan pembaca. Sejak awal penerbitan,

Suara Merdeka telah menjadikan masyarakat golongan menengah ke atas sebagai target group. Secara segmented sasarannya adalah segmen psikografik masyarakat Jawa Tengah yang terdiri atas berbagai lapisan dan kelompok, itulah yang kemudian memunculkan identitas yang kemudian menjadi slogan “Koran Jawa Tengah” penelitian kelompok sasaran ini dengan sendirinya juga menentukan penekanan kebijakan pemberian, penyajian pendapat, serta pemilihan topik ulasan, semuanya dimaksudkan agar isi harian ini dirasakan manfaatnya bagi pembaca (Massoesiswo, dkk. 2003: 24)

Dalam konteks otonomi daerah, sudah tentu penonjolannya beritaberita daerah yang harus dtekan dalam pemberitaannya. Melihat posisi strategis dalam visi misi *Suara Merdeka*, penulisan berita daerah memang harus

memperlihatkan cirri-ciri khusus. *Pertama*, haruslah disadari pembaca pada umumnya sudah mengenal keadaan serta tokoh-tokoh dalam masyarakat daerah setempat. *Kedua*, berita daerah punya jangkauan dampak dan pengaruh terbatas kepada wilayah tertentu. Bagi orang-orang yang tinggal di wilayah itu, atau tidak mengenalnya bias jadi berita tersebut tidak mempunyai nilai.

Namun kendati orang yang bertempat tinggal di tempat yang jauh tetapi pernah berdiam di wilayah tersebut dengan baik, berita-berita daerah masih menarik. Cara berfikir *Suara Merdeka* adalah "Menggugah, mendekatkan, mempersatukan, mempersentuhkan, merekatkan " masyarakat Jawa Tengah. *Ketiga*, dalam konteks otonomi daerah, pemosisian berita sebagai " *Perekat* " diartikan sebagai upaya agar memberi daya tarik bagi pembaca sekalipun ia buan penduduk daerah tersebut (Massoesiswo,dkk, 2002: 28). Porsi pemberitaan harus memperhatikan aspek pemerataan pemberitaan meliputi : gambar, ulasan, laporan. *Suara Merdeka* secara umum melalui kebijaka rubrikasi dan pengaturan halaman berkisar sebagai berikut: berita Regional(Jateng/ DIY termasuk Semarang) adalah 50%, berita Nasional (termasuk daerah perbatasan) sejumlah 30%, berita Internasional sejumlah 20%. Ditinjau dari jenisnya, maka *Suara Merdeka* diharakan mampu meliput berbagai bidang : politik, ekonomi, hukum, kriminalitas, olahraga, kebudayaan, pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, kemanusiaan, dan sebagainya.

Kebutuhan semua golongan dan dan lapisan pembaca harus terpenuhi, kaerena *Suara Merdeka* menetapkan segmen geografis, bukan suatu golongan masyarakat yang harus selau dijga, titik sentuh bidang-bidang itu tetap harus mengacu pada segmen geografis, yakni porsi kebutuhan dan kedekatan Jawa Tengah (Massoesiswo,dkk,2002: 36).